

Analisis Kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Musi Rawas Utara

S. Fachrian, Adriadi*

Universitas Muhammadiyah Bengkulu
rekhoadriadi@gmail.id

Abstrak. The researcher conducted a study entitled Performance Analysis of the General Election Commission in Increasing Community Political Participation in the 2020 Regional Head Elections in North Musi Rawas Regency. The problem posed is how the performance of the KPU in Musi Rawas Utara Regency in increasing political participation there in 2020 increases when compared to 2015. The purpose of the study is to find out how the performance and procedures for implementing the KPU work program in North Musi Rawas Regency and the mechanism for carrying out the stages of the post-conflict local election. This research was designed using qualitative research methods. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation. The informants in this study were KPU commissioners, KPU employees, and ordinary people who were involved in and witnessed the post-conflict local election in North Musi Rawas Regency. This study uses 5 indicators in measuring the performance of the KPU, the first is the concept of Productivity, which measures the level of efficiency and effectiveness of the KPU's services. Second, service quality, namely community satisfaction, can be a parameter to assess the performance of public organizations. Third, Responsiveness is the ability of the organization to recognize the needs of the community, set the agenda and service priorities. Fourth, Responsibility explains whether the implementation of public organization activities is in accordance with correct administrative principles. Fifth Accountability shows how much the policies and activities of the organization are subject to political officials elected by the people directly.

Keywords: Performance, 5 Indicators, North Musi Rawas KPU

Abstrak. Peneliti melakukan penelitian yang berjudul Analisis Kinerja Komisi pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Tahun 2020 Di Kabupaten Musi Rawas Utara. Permasalahan yang diajukan yaitu bagaimana kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam meningkatkan Partisipasi politik disana pada tahun 2020 meningkat jika dibandingkan dengan 2015. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja dan tata cara pengimplementasian program kerja KPU di Kabupaten Musi rawas Utara serta mekanismenya dalam melakukan tahapan pemilukada. Penelitian ini dirancang dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini adalah komisioner kpu pegawai kpu serta masyarakat biasa yang terlibat serta menyaksikan jalannya pemilukada di kabupaten Musi rawas Utara. Penelitian ini menggunakan 5 indikator dalam mengukur kinerja kpu yang pertama adalah konsep Produktivitas yaitu mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas pelayanan kpu. Kedua Kualitas Pelayanan yakni kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik. Ketiga Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat menyusun agenda serta prioritas pelayanan. Keempat Responibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik sesuai prinsip-prinsip administrasi yang benar. Kelima Akuntabilitas menunjukkan seberapa besar kebijakan serta kegiatan organisasi tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat langsung.

Kata kunci: Kinerja, 5 Indikator, KPU Musi Rawas Utara

PENDAHULUAN

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut. Negara demokratis berarti negara yang memiliki bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut paham demokrasi. Dalam paham ini rakyat memiliki kedudukan yang sangat penting, sebab

kedaulatan berada di tangan rakyat. Pemilihan umum adalah sarana yang diikuti oleh rakyat Indonesia dalam mengekspresikan diri dalam pemilihan kepala pemerintahan baik dari tataran pusat hingga pada tataran daerah itu sendiri. (Hadiyansyah, 2014). Dengan kata lain pemilu merupakan instrument pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara. Pemilu sebagai penyaluran atas hak asasi manusia karena merupakan legalitas dan legitimasi politik dalam demokrasi modern. Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang asas penyelenggaraan pemilu (M. Hadiyansyah Dkk ; 159). Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu (Yuni Kartika, 55 ; 2019) Pemilihan umum ini dilakukan serentak di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Provinsi Sumatera Selatan, dimana dari lima kabupaten yang melaksanakan pemilihan kepala daerah, Masyarakat yang tinggal di Provinsi tersebut mempunyai angka partisipasi politik yang bisa dikatakan tidak rendah. Hal ini ditunjukkan dengan data yang peneliti rangkum pada tabel dibawah ini :

Tabel 1 Tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 :

No	Tahun	Kabupaten	Persentase
1	2020	Musi Rawas	80%
2	2020	Pali	80%
3	2020	Ogan Ilir	81,28%
4	2020	Ogan Komering Ulu Selatan	85%
5	2020	Musi Rawas Utara	80,42%

Sumber: Komisioner KPU Sumatera Selatan Divisi Sosialisasi, Paramas dan SDM Amrah Muslimin Dalam Antara News Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat partisipasi politik pada pilkada serentak di lima Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan melampaui angka 80%. Jika melihat persentase partisipasi politik masyarakat yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara mencapai angka 80,42%, hal itu menjadi pertimbangan dalam penelitian ini dikarenakan Musi Rawas Utara menduduki urutan ketiga terbesar se-Provinsi Sumatera Selatan atau dengan kata lain tingkat partisipasi politik di daerah tersebut dinilai cukup tinggi. Dengan meningkatnya pencapaian partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Musi Rawas Utara maka perlu dilakukan sebuah kajian akademis guna mencari tahu meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik pilkada di daerah tersebut.

Dengan demikian, dari beberapa ahli dan doktrin yang dikemukakan diatas bisa di tarik benang merahnya bahwa yang dimaksud kinerja adalah sebuah bentuk dari hasil tata kerja, tata kelola dan prestasi kerja yang dilakukan oleh seseorang dan telah melaksanakan tanggung jawab dan kewenangan untuk kepentingan internal dan eksternal atas amanah yang diemban didalam suatu lembaga ataupun instansi. Ada beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik menurut Agus Dwiyanto (2008;41) dalam bukunya Reformasi kebijakan Publik indikator-indikator atau kriteriakriteria kinerja organisasi publik

adalah produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas. Indikator-Indikator atau kriteria kriteria tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat sering kali tersedia secara mudah dan murah yang dapat diperoleh dari media massa dan diskusi publik.

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukan sebagai salah satu indikator kinerja organisasi publik karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit (Waru & Qorib, 2022). Akuntabilitas publik menunjukkan pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat, asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Menurut Harris G. Warren, pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah.

METODE PENELITIAN

Tempat atau lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan oleh peneliti dengan judul yang sudah ditetapkan dari awal. lokasi penelitian ini berada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas Utara yang bertempat di Jalan Lintas Sumatera KM 65 Desa Noman baru Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini dimulai pada Bulan Mei hingga Bulan Agustus Tahun 2021, dimana peneliti menggambarkan keadaan objek berdasarkan informasi yang didapatkan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), penelitian ini berisi kutipan-kutipan data dengan memberikan laporan dalam bentuk naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi sesuai dengan kasus yang tengah diteliti. Fungsi dari sumber data adalah sumber dimana untuk mengetahui dari mana data itu didapatkan. Menurut Moeloeng (2001), Pencatatan sumber data melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil dari gabungan kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. penelitian kualitatif ini dilakukan secara sadar dan memperoleh informasi yang benar dan dibutuhkan. Sumber data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara kepada masyarakat dari data responden secara lisan. Data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dengan menggunakan sumber pertama. Intrumentnya adalah dengan observasi dan wawancara secara langsung kepada informan. peneliti mengajukan dan memberikan pertanyaan langsung kepada informan mengenai permasalahan yang diteliti. (Sugiyono;2016). Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari studi kepustakaan, tulisan ilmiah, ataupun teknik dokumentasi yang relevan

dengan penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, jurnal ilmiah, makalah, internet dan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu. (Sugiyono;2016). Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Kepala daerah di Kabupaten Musi Rawas Utara.

No	Indikator
1	Produktivitas
2	Kualitas Pelayanan
3	Responsivitas
4	Responsibilitas
5	Akuntabilitas

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yang dimana dalam pemilihan sample berdasarkan dengan kriteria tertentu sehingga mampu memberikan informasi yang spesifik dan representatif tentunya. *Purposive sampling* digunakan karena adanya pertimbangan tertentu. Sampel yang digunakan atau yang diambil bukan berdasarkan strata, *random* (acak), atau daerah, akan tetapi didasarkan pada suatu tujuan (Aridal ; 2014). Teknik pengumpulan data berguna untuk memperoleh informasi dalam penelitian, dan merupakan langkah yang penting untuk mendapatkan data yang valid.

PEMBAHASAN

KPU yang ada sekarang merupakan KPU keempat yang dibentuk sejak era Reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota, idari unsur pemerintah dan Partai Politik. KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum. Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Penyelenggara iPemilu berpedoman kepada asas: mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas. Seiring dengan berjalannya waktu, pasca Kabupaten Musi Rawas Utara terbentuk. Tidak menutup kemungkinan bahwa lembaga ini pun terbentuk atas keinginan dan ikebutuhan masyarakat Muratara. Komisi pemilihan Umum (KPU)

Kabupaten Musi Rawas Utara, merupakan suatu lembaga yang mempunyai susunan hierarkis yang teratur dan sistematis.

Untuk mengetahui hasil Analisis Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas Utara, dapat diperoleh dari hasil wawancara secara langsung kepada para pegawai KPU dengan menggunakan metode wawancara secara terstruktur dengan berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun oleh penulis mengenai hal-hal yang berhubungan terhadap hak dan kewajiban dalam menjalankan tugasnya, yang peneliti jabarkan di bawah ini sebagai berikut.

Penulis mengambil 5 informan dalam wawancara tersebut diantaranya; Ketua KPU Kabupaten Musi Rawas Utara, Ketua Divisi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan, Partisipasi, Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPUD Kabupaten Musi Rawas Utara, Staff Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara, dan Masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara. Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan yang peneliti dapatkan di tempat penelitian yang peneliti uraikan sebagai berikut: Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output (Dwiyanto 2008).

Maka dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas Utara dalam aspek produktivitas memberikan informasi pentingnya berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2020 untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah melalui sosialisasi/diskusi ke berbagai lapisan masyarakat, media informasi cetak seperti spanduk, dan imedia sosial. Kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat sering kali tersedia secara mudah dan murah yang dapat diperoleh dari media massa dan diskusi publik.

Kualitas Pelayanan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dapat dilihat dari jenis pelayanan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Umum 2020 yang dibagi menjadi dua macam, yaitu pelayanan kepada masyarakat sebagai pemilih dan partai politik sebagai peserta Pemilihan Umum 2020. Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Agus Dwiyanto (2008;41) Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja organisasi publik karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dapat dilihat pada arah KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam mengenali kebutuhan masyarakat untuk dijadikan program yaitu dengan cara melakukan diskusi dengan seluruh lapisan masyarakat. Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit.

Responsibilitas KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dapat dilihat dari bagaimana KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam menyusun sebuah program maupun kegiatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2020, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam menyusun

program sudah sesuai dengan peraturan yang mengatur tugas dan kewenangan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam melaksanakan program dan kegiatan. Regulasi yang menjadi acuan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam menyusun program dan kegiatan yaitu Peraturan KPU, Peraturan Pemerintah, dan juga Undang-Undang yang berlaku. Akuntabilitas ini untuk menunjukkan pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat, asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat (Dwiyanto 2008)

Dalam menciptakan akuntabilitas, bentuk transparansi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melalui dua sarana, yaitu transparansi melalui sarana website yang dimiliki KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dan website BPK-RI untuk permasalahan anggaran. Kinerja sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi demi terjalannya suatu roda organisasi menuju kedepannya, sehingga kinerja bisa disebut sebagai segala hasil capaian dari segala bentuk tindakan dan kebijakan dalam rangkaian usaha pada jangka waktu tertentu guna mencapai suatu tujuan. Kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat di nilai dari hasil kerjanya. Kinerja dalam organisasi, merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kemudian Hasibuan (2001:34) mengemukakan kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang di capai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang di bebaskan kepadanya yang di dasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu. Dalam penelitian ini peneliti sudah turun langsung kelapangan untung mewawancarai informan mengenai kinerja mereka disini peneliti hanya mengambil 5 orang untuk diwawancarai, karena menurut peneliti 5 orang ini sudah cukup sebagai acuan keseluruhan dalam penelitian ini. Peneliti dapat menginterpertasikan bahwa kinerja dari KPU Kabupaten Musi Rawas Utara sudah cukup baik dalam meningkatkan partisipasi politik terhadap masyarakat hal ini bisa dilihat dari persentase di dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Tingkat Partisipasi Politik Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Kecamatan	Presentasi Partisipasi Dalam %
1	Rupit	80,76%
2	Rawas Ulu	81,97%
3	Rawas Ilir	75,38%
4	Ulu Rawas	83,63%
5	Karang Jaya	80,77%
6	Karang Dapo	76,08%
7	Nibung	80,18%

Sumber : Dokumen KPU Kabupaten Musi Rawas Utara

Dari hasil pencermatan tabel tingkat partisipasi diatas, dapat dijabarkan kembali bahwa Kabupaten Musi Rawas Utara punya data yang beragam terkait dengan data partisipasi pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020. jika dilihat dari segi produktivitas KPU Kabupaten Musi Rawas Utara telah berusaha semaksimal mungkin melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan elemen masyarakat terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Musi Rawas Utara

sebagaimana yang telah dijabarkan di sub bab sebelumnya. Dari kegiatan tersebut berdampak pada tingginya angka persentase partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020.

Dalam kualitas pelayanan, pelayanan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Muratara sudah dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Seperti pelayanan informasi dapat diakses dengan mudah melalui website yang dimiliki KPU Kabupaten Muratara. Pelayanan di tingkat Kecamatan hingga TPS juga dapat diperoleh melalui petugas KPU yang ada. Dalam Indikator ketiga yakni responsivitas, KPU Kabupaten Muratara dalam menjalankan programnya selama tahapan Pemilihan Umum sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat ini. Melalui sosialisasi, diskusi dan FGD, KPU Kabupaten Muratara menangkap kebutuhan dan mengimplementasikan program sesuai hasil forum bersama masyarakat tersebut. Program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat juga dirasakan oleh masyarakat langsung, dalam Pemilihan 2020 yang lalu masyarakat tidak menemukan kesulitan selama penyelenggaraan Pemilu.

Pada indikator keempat yakni responsibilitas, dapat dilihat dari bagaimana KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam menyusun sebuah program maupun kegiatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2020, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam menyusun program sudah sesuai dengan peraturan yang mengatur tugas dan kewenangan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam melaksanakan program dan kegiatan. Regulasi yang menjadi acuan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam menyusun program dan kegiatan yaitu Peraturan KPU, Peraturan Pemerintah, dan juga Undang-Undang yang berlaku sehingga dalam hal ini KPU Kabupaten Musi Rawas Utara bertugas menjabarkan peraturan tersebut melalui program-program yang akan dilaksanakan sehingga bersifat vertikal. Dan dalam indikator kelima dalam menciptakan akuntabilitas, bentuk transparansi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara melalui dua sarana, yaitu transparansi melalui sarana website yang dimiliki KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dan juga melalui media papan pengumuman yang digunakan sebagai instrumen menempel terkait informasi yang berhak diperoleh oleh masyarakat dan peserta Pemilihan Umum 2020. Untuk transparansi penggunaan anggaran juga dapat dilihat pada website BPK RI setelah evaluasi dan pemeriksaan penggunaan anggaran oleh BPK. Adapun pembahasan yang sudah peneliti jabarkan di atas merupakan hasil dari wawancara dan juga peneliti buktikan dengan observasi langsung dilapangan serta ditambah dengan arsip-arsip KPU Kabupaten Musi Rawas Utara. dalam hal ini peneliti ingin menyampaikan secara keseluruhan kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara sudah cukup baik. Sangat besar harapan peneliti setelah selsai penelitian ini kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dapat lebih baik lagi, sehingga KPU Kabupaten Musi Rawas Utara bisa untuk meningkatkan partisipasi politik di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Kesimpulan

Kinerja KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Umum 2020 sudah optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari fenomena yang terdapat pada produktivitas, orientas kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Dari kelima hal tersebut sudah berjalan secara optimal, hal ini bisa dilihat pada lima indikator yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto dalam bukunya reformasi kebijakan publik dimana .pada aspek produktivitas, orientas kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas sudah

dilaksanakan sebaik-baiknya oleh KPU Musi Rawas Utara pada Pilkada Tahun 2020, sehingga hal ini berdampak pada tingginya angka persentase partisipasi politik masyarakat Kabupaten Musi Rawas iUtara yang mencapai di atas 70%. KPU harus lebih memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan umum ke seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara agar apa yang dilakukan dapat menyeluruh di seluruh tempat yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara. Untuk seluruh masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara kita harus memiliki kesadaran secara penuh untuk selalu ikut mensukseskan pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Aridal, (2014). Paradigman Dan Model Penelitian Komunikas, (Jakarta:Bumi Aksara)
- Boore, C. George. (2010). Psikologi Sosial. Jogjakarta: Prismashopie
- Budiarjo, M. (2007). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia PustakaUtama.
- Djogo, Tony, Dkk.(2003) . Kelembagaan Dan Kebijakan Dalam Pengembangan Agroforestri,World Agroforestri Centre (ICRAF), Bogor
- Firmanzah, (2010). Persaingan Legitimasi Kekuasaan. dan Marketing Politik, (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jimly Asshidiqie, (2005). Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Konstitusi Press. Jakarta
- Hidayansyah, Muhammad Dkk. (2018)“Peran Kpu Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Kota Malang”. *Jurnal Civic Hukum* Volume 3, Nomor 2, November 2018.
- Morisson. (2005). Hukum Tata Negara RI Era Reformasi. Jakarta: Ramdina Prakoso
- Nimmo, Dan. (2005). Komunikasi Politik Komunikator, Pesan, dan Media. Bandung: PT Rempaja Rosdakarya
- Ramlan, S. (2006). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
- Sigit Pamungkas. (2012). Pemilu, Perilaku Pemilih dan Kepartaian. IDW Press. Yogyakarta.
- Suharizal. (2010). Pemilukada. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Susiadi, (2015), Metodologi Penelitian, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2MIAIN Raden Intan Lampung)
- Sugiyono, (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, (Bandung,Alfabeta)
- Soekanto, Soerjono. (2012). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Surbakti, Ramlan.(2007). Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia.
- Hutami, Gartiria. 2011. Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Indenpendensi Auditor Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Inspektorat Kota Semarang)
- Kartika, Yuni dkk. “Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (Kpud) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilukada Di Kabupaten Muna Barat”. *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal PenelitianKajian Ilmu Komunikasi dan Informasi*. Volume 4, No. 2, April 2019.
- Waru, AV & Qorib, F. 2022. Identitas Jokowi dalam Pelantikan Presiden Periode 2014 & 2019 di Televisi. *Communicator Sphere*. Vol 1 No 1. Pg 1-19